



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA KERJA 2027



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan professional.

Painan, Mei 2026

Kepala,



RIANDI, S.E., M.M

Pembina Tingkat I / IV/b

NIP. 19700608 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	64
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	69
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	112
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	113
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah	113
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	119
3.3 Tugas pokok dan Fungsi Organisasi.....	122
3.4 Program dan Kegiatan	140

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	156
BAB V Penutup.....	169
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja BPKPAD Tahun 2025.....	13
Tabel T-C 29 Rekaitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	14
Tabel 2.2 Capaian Realisasi Keuangan Sampai Dengan 31 Desember 2025	37
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran, Program Kegiatan yang mendukung Kinerja BPKPAD sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025	46
Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Program,Kegiatan /Sub Kegiatan sesuai Dokumen Anggaran	47
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD.....	63
Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	66
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027.....	70
Tabel T-C.32 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027	112
Tabel 3.1 Tujuan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	121
Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Kunci sesuai Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	122

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028..... 141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah.....	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan Renja dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Penyusunan Renja Tahun 2027 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja perangkat daerah, isu-isu strategis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi. Tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks, terutama dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil agar

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal. Renja Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2027.

Sebagai dokumen rencana tahunan untuk APBD, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra.
2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA/KUPA dan PPAS/PPAS, serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2027.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi sejauhmana capaian kinerja pelaksanaab program/ kegiatan instansi pada Tahun berkenaan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2027 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja 2025, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian teradap kondisi terkini yang dihadapi. Langkah ini ditempuh guna mendapatkan

gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/ kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2027 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan:

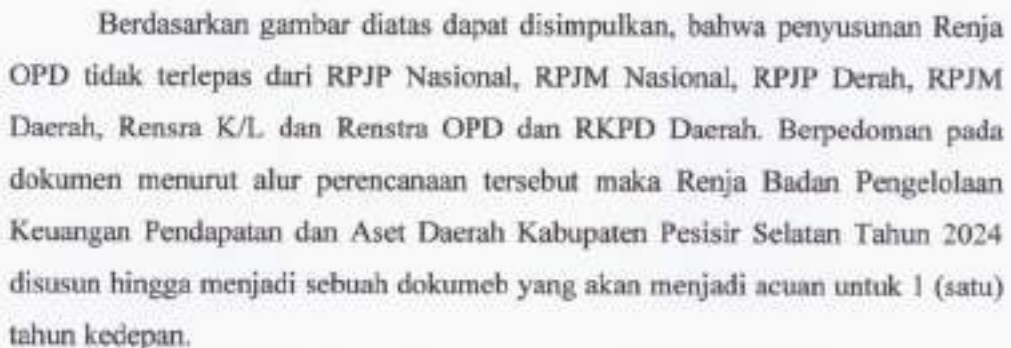
1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2027.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Subtansi Renja memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju
4. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing.
5. Program/ kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya,

6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No. 25/2004



Page 4

dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen ini juga menunjukkan peran kedua lembaga Kementerian tersebut dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024 bahwa Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah: **“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”**

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakkan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Selain harus selaras dengan Renstra K/L, renstra BPKPAD juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan juga harus sejalan dengan Renstra Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini pengelolaan keuangan daerahnya ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yakni program yang menjelaskan tentang fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar dalam memberikan arahan dan koordinasi tentang pengelolaan keuangan daerah bagi Kabupaten/ Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Namun dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana menilai kinerja dari pengelolaan keuangan tersebut untuk mendapatkan Opini BPK atas laporan keuangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029; dan
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah:

a. Maksud Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah selama Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, Renja disusun untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah Tahun Anggaran 2027;
2. Menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah secara optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program serta kegiatan perangkat daerah selama Tahun 2027;
7. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
8. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027 ini disusun melalui proses Rapat Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan Stakeholder internal maupun eksternal Urusan Keuangan.

Rencana Kerja ini selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh tim yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Fungsional Tertentu dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar substansi pada bab-bab berikutnya

dapat dipahani dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra K/L, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peratulan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
- 3.4 Program Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan maupun ketersediaan anggaran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sasaran strategis yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/ tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran tersebut diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Hal ini juga menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sasaran strategis, indikator dan target yang akan dicapai oleh BPKPAD.

Tabel 2.1 dibawah ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

**Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	(A) 90	(A) 88,41	98%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		3. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	11,50%	12,74%	111%
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100	99	99%
TOTAL					102%

Pada Tahun 2025 ini sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 Program, 15 Kegiatan dan 66 sub Kegiatan dalam mendukung untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi.

Project Name	Project Description	Project Start Date	Project End Date	Project Status	Project Budget (USD)	Project Actual Cost (USD)	Project Variance (USD)	Project ROI (%)	Project Risk Level
Project A	Project A Description	2023-01-01	2023-12-31	Completed	1000000	950000	50000	5.0%	Low
Project B	Project B Description	2023-02-01	2023-11-30	In Progress	800000	780000	20000	2.5%	Medium
Project C	Project C Description	2023-03-01	2023-10-31	On Hold	600000	600000	0	0.0%	High
Project D	Project D Description	2023-04-01	2023-09-30	Completed	400000	380000	20000	5.0%	Low
Project E	Project E Description	2023-05-01	2023-08-31	In Progress	200000	190000	10000	5.0%	Medium
Project F	Project F Description	2023-06-01	2023-07-31	Completed	100000	95000	5000	5.0%	Low
Project G	Project G Description	2023-07-01	2023-06-30	On Hold	300000	300000	0	0.0%	High
Project H	Project H Description	2023-08-01	2023-05-31	Completed	150000	140000	10000	6.7%	Low
Project I	Project I Description	2023-09-01	2023-04-30	In Progress	75000	70000	5000	6.7%	Medium
Project J	Project J Description	2023-10-01	2023-03-31	Completed	50000	45000	5000	10.0%	Low
Project K	Project K Description	2023-11-01	2023-02-28	On Hold	25000	25000	0	0.0%	High
Project L	Project L Description	2023-12-01	2023-01-31	Completed	12500	11500	1000	8.0%	Low

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan

RENJA BPKPAD KAB. PESISIR SELATAN

Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD	278.644.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan Hasil Keuangan Penyusunan Laporan SKPD	378.644.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Penyusunan dan Pengawasan Belanja Tambahan	Jumlah Dokumen Belanja Tambahan dan Tambak Lanjut Penambahan	149.300.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semester SKPD	179.640.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	191.104.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1.097.257.000	27.541.000	27.453.800	2.59	14.794.250	42.163.125	3,84	-	0,00
Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, dan Evaluasi Barang Milik Daerah SKPD	119.440.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	149.300.000	27.541.000	27.453.800	18,39	14.794.250	42.163.090	28,34	-	0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKPD	237.589.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	248.740.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Rakorbulat dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rakorbulat dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.440.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Pemantauan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemantauan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	119.440.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Pemantauan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	83.608.000	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00

	Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sistem operasional penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah	Jumlah Kegiatan dan Penerimaan Tahun Operasional Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah	250.000.000	-	45.424.082	43.344.850	16,14	-	40.344.850	16,14
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Administrasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Administrasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	630.000.000	-	-	-	56,78	-	287.486.584	56,78
	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Penganggaran dan Penganggaran dan Pembinaan Kabupaten/ Kota	565.000.000	-	21.978.466	13.602.900	17,49	-	127.222.545	22,42
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten Kota Kabupaten Kota	Jumlah BLUD Kabupaten Kota yang Ditinjau (Lampung)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kota (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Peningkatan Efisiensi Berbasis Pengolahan Keuangan Daerah	Penelitian dan pengujian efisiensi sistem dan prosedur administrasi dan keuangan daerah	1.796.777.480.996	1.021.501.612,124	271.339.881,448	248.948.772,283	71,37	249.571.216,386	1.526.961.438,613	85,32
	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penganggaran Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Analisis Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Program Pemerintah Daerah	Analisis Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Program Pemerintah Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Civilian Pabrik dan Benda Program Pemerintah Daerah	Analisis Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Civilian Pabrik dan Benda Program Pemerintah Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Program Pemerintah Daerah	Analisis Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Program Pemerintah Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pencapaian Standar Haring Milk Daerah dan Standar Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Standar Haring Milk Daerah dan Standar Kebersihan Haring Milk Daerah (Dibareng)	418.695.590	155.167.999	34.845.440	34.653.610	48,31	-	285.766.683	48,33
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	477.000.000	67.634.492	21.988.733	20.891.571	20,73	22.371.020	111.887.113	24,33
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	842.131.033	921.108.549	291.432.640	585.033.095	147,81	34.179.750.100	36.179.750	213,54
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	1.064.096.579	198.085.990	-	-	18,29	-	190.085.990	18,29
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	1.006.000.000	433.949.388	99.443.032	46.631.060	46,88	53.271.033.30	53.943.083	53,39
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	177.000.000	33.854.400.00	8.449.666	3.780.320	9,09	-	17.634.720	9,05
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	630.000.000	273.757.860	44.594.360	31.715.850	46,49	330.696.000.00	62.679.230	96,38
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	308.241.820	152.108.322	18.908.212	16.958.735	47,31	-	168.197.287	47,32
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	425.552.000	224.512.134	43.305.614	44.772.292	61,80	49.013.710.00	318.208.156	73,88
	Pencapaian Kebersihan Haring Milk Daerah	Jumlah Kebersihan Haring Milk Daerah	288.000.000	107.525.990	32.130.746	33.867.533	68,21	-	139.333.633	48,21
IV	Monev Kualitas Pengawasan Pengaliran Daerah	Basis PAU	8.636.897.721	5.139.846.287	1.826.234.068	1.472.620.697	76,81	2.895.526.348	8.787.993.912	100,79
	Monev Kualitas Pengawasan Pengaliran Daerah	Catatan pencapaian dan progres pencapaian (%)	-	-	-	-	76,81	-	-	-

	Pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dekonvensi Hasil Pemeliharaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	511.343.304	256.185.274	161.479.450	156.760.222	86,76	467.037.710,00	879.983.346	872,89
	Pembinaan dan pengawasan pengelompokan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan dan Pengawasan Pengelompokan Retribusi Daerah	155.000.000	108.220.300	162.122.300	390.684.459	176,83	171.134.800,00	442.139.580	256,98
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelompokan Transaksi Pemerintahan Daerah	135.000.000	100.344.857	69.647.716	66.574.008	123,72	128.507.680,00	296.351.545	218,76

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.2.1 Program/ Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset/barang daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset/barang daerah serta pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pengelolaan pendapatan daerah meliputi mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, serta peraturan pendapatan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai

acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Pada Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang mana Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki Indikator Kinerja Kunci **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah** dengan Target **WTP** sebanyak 13 kalinya.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah diatas maka program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

TABEL 2.2

Capaian Realisasi Keuangan Sampai Dengan 31 Desember 2025 Pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Realisasi			Sal. Anggaran
	Takson APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	FISIK	Nilai (Rp.)	% Capaian	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.536.011.349	83,6	258.492.682.829	94,14	16.943.329.328
1.1	-	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.745.533.198	88,91	1.461.738.187	95,2	83.774.971
1.1.1	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	78.586.312	100	76.514.961	97,46	1.991.351
1.1.2	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	52.833.996	100	52.470.495	99,31	163.501
1.1.3	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	15.963.449	100	15.150.090	97,9	753.359
1.1.4	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	38.885.257	100	38.328.648	98,62	136.609
1.1.5	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	123.858.234	100	123.742.800	99,91	115.434
1.1.6	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	77.436.980	55	76.381.703	98,63	1.045.287
1.1.7	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Pemantauan Daerah tentang APBD dan Pentanaran Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD	446.577.636	82,3	423.790.980	94,89	22.886.656

1.1.8	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	562.525.259	85,66	556.766.194	97,91	11.759.065
1.1.9	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyesuaian Peraturan serta Kebijakan Bidang Anggaran	214.999.892	100	191.495.510	89,07	23.504.376
1.1.10	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Pelaksanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114.036.133	100	93.136.800	81,68	20.899.333
1.2	-	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	398.658.706	88,82	392.697.364	98,18	5.961.342
1.2.1	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	39.632.264	83,01	38.343.900	96,87	1.288.364
1.2.4	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asuransi, Sekurisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya	57.610.698	85	54.403.364	94,43	3.206.334
1.2.9	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	281.385.744	96,4	279.949.700	100,31	1.437.044
1.3	-	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	480.381.710	70,87	397.876.628	82,84	82.505.082
1.3.2	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LD dan Beban	139.048.214	79,09	129.270.897	93,03	9.777.317
1.3.4	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89.980.340	70,38	80.342.025	89,25	9.638.315
1.3.5	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.804.744	77,36	99.680.366	98,88	1.124.378
1.3.6	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Laporan/Indeks Laporan Terpadu LRP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	36.944.430	31,88	29.332.361	79,4	7.612.069
1.3.8	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.003.432	61,07	5.776.466	96,22	226.966
1.3.9	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknik Operational Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	41.424.080	68,76	40.344.850	97,38	1.079.230
1.3.11	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31.976.466	26,17	12.622.900	39,48	19.353.566
1.4	-	5.02.02.2.04	Pemenuhan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	171.839.851.448	81,87	155.980.771.453	90,78	15.859.079.995
1.4.1	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.04.08	Analisis Pemenuhan dan Penyelaran Bantuan Keuangan	239.343.607.335	81,67	248.602.012.952	95,63	11.341.594.564
1.4.2	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendesa	9.312.500.053	95	6.109.685.600	122,14	3.192.814.453
1.4.3	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.193.344.079	0	1.830.072.061	90,96	1.354.671.178
1.5	-	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	181.794.327	82,68	89.605.000	49,35	12.189.327
1.5.1	APBD PERUBAHAN	5.02.02.2.05.01	Implementasi dan Perbaikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	181.794.327	82,68	89.605.000	49,35	12.189.327
2	-	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	935.182.462	62,35	862.941.886	92,28	72.140.576
2.1	-	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	935.182.462	62,35	862.941.886	92,28	72.140.576
2.1.1	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	23.244.180	61,63	44.347.806	94,04	8.096.290
2.1.3	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	34.843.440	34,38	34.603.610	99,31	239.830
2.1.4	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.988.732	33,21	20.891.371	72,07	8.097.361
2.1.5	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.05	Pembatalan Barang Milik Daerah	991.452.640	71,77	585.033.085	58,91	6.419.555
2.1.7	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.07	Pengurusan Barang Milik Daerah	39.445.032	44,39	46.631.060	98,44	12.813.972
2.1.9	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.09	Pengurusan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.449.485	48	3.780.320	58,61	2.669.165
2.1.10	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan	44.384.390	18,89	31.715.830	71,17	12.668.560

			Penghapusan Barang Milik Daerah					
2.1.11	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18.908.212	90	16.958.735	89,68	1.949.477
2.1.12	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.195.814	90	44.772.292	99,26	423.522
2.1.13	APBD PERUBAHAN	5.02.03.2.01.13	Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52.190.746	16,88	33.807.533	64,83	18.343.213
3	-	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.526.228.068	73,16	1.472.420.697	175,85	53.697.371
3.1	-	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.526.228.068	73,16	1.472.420.697	175,85	53.697.371
3.1.1	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	11.134.680	69,99	11.779.222	100	359.458
3.1.2	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	65.181.800	84,6	61.325.300	93,41	4.161.500
3.1.3	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.03	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah	39.513.400	62,33	27.828.923	70,43	11.684.477
3.1.4	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.04	Penyusunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	359.780.750	73,41	352.788.490	98	7.002.260
3.1.5	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.05	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	131.667.980	52	124.531.352	94,58	7.136.628
3.1.7	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Sisa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPHTH)	49.070.650	36,11	48.943.469	99,54	227.181
3.1.8	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.000.000	78,13	29.796.782	99,19	203.218
3.1.10	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	239.629.400	42,57	239.131.958	99,88	297.442
3.1.11	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	173.897.600	32,14	161.284.431	92,75	12.613.169
3.1.12	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	32.088.348	81,38	31.337.150	97,66	751.198
3.1.13	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	561.479.490	100	556.760.223	100	4.719.268
3.1.14	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	162.122.300	100	160.684.450	100	1.437.850
3.1.15	APBD PERUBAHAN	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	69.647.700	58,77	46.634.008	66,73	2.972.502
4	-	5.02.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.907.064.893	44,38	16.816.705.864	44,99	20.290.159.029
4.1	-	5.02.05.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.652.100	100,15	64.286.230	99,43	365.870
4.1.1	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.652.100	100,15	64.286.230	99,43	365.870
4.2	-	5.02.05.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.544.659.821	41,91	14.476.311.675	41,91	20.067.808.146
4.2.1	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.307.349.821	41,51	14.259.361.675	41,51	20.067.808.146
4.2.2	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.250.000	100	227.250.000	100	0
4.3	-	5.02.05.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.541.000	100	27.458.800	99,7	82.200
4.3.2	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.03.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	27.541.000	100	27.458.800	99,7	82.200
4.5	-	5.02.05.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.989.052	97,41	373.629.664	89,19	45.279.228
4.5.1	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.758.558	100	43.130.690	81,54	9.627.868
4.5.3	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.494.201	100	41.116.186	81,43	9.378.015
4.5.4	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.05	Penyediaan Barang Cerdan dan Pengadaan	34.658.900	100	33.537.981	96,77	1.120.920
4.5.5	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perbaikan Perundang-undangan	13.600.000	100	8.600.000	63,24	5.000.000
4.5.7	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.08	Facilities Kegiatan Tamu	20.090.000	100	18.992.200	94,54	1.097.800
4.5.8	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.09	Penyediaan/penyediaan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.197.433	97,24	213.698.508	91,03	21.008.925
4.5.9	APBD PERUBAHAN	5.02.05.2.06.10	Penyediaan/penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000	66,00	13.154.000	99,65	46.000
4.6	-	5.02.06.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.511.000	100	187.505.000	96,78	24.002.000
4.6.4	APBD PERUBAHAN	5.02.06.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.511.000	100	157.509.000	86,78	24.002.000

4.7	-	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.164.180	86,26	432.612.378	71,78	56.881.801
4.7.1	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.092.000	100	444.032.375	90,44	46.059.625
4.7.2	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.172.180	0	187.180.003	94,14	9.992.177
4.8	-	5.02.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.447.700	93,46	885.597.117	87,88	96.070.583
4.8.1	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.791.700	104,17	41.309.593	99,06	102.107
4.8.2	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.180.000	104,17	152.335.934	89,51	17.844.066
4.8.4	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	149.950.000	78,47	135.887.150	90,62	14.062.850
4.8.5	APBD PERUBAHAN	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	619.836.000	93,75	556.964.440	86,09	63.771.560
Total				313.904.486.792	--	277.445.149.696	--	36.459.337.116
Pencapaian Belan di synchronize Tindaklanjuti synchronize pada 2025-01-03 01:00:22				-	77,2	88,39	90,2	-

2.2.2 Realisasi Anggaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Kinerja BPPKAD sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, BPPKAD melaksanakan serangkaian Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerjanya yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN	%	SISA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.907.064.893	44,98	16.616.905.964	44,99	20.290.159.829
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.652.100	100,15	64.286.230	99,43	365.870
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.652.100	100,15	64.286.230	99,43	365.870
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.544.619.821	41,91	14.476.811.675	41,91	20.067.808.146
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.307.369.821	41,51	14.239.561.675	41,51	20.067.808.146

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	237.250.000	100	237.250.000	100	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.541.000	100	27.458.800	99,7	82.200
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	27.541.000	100	27.458.800	99,7	82.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.909.092	97,41	373.629.864	89,19	45.279.228
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.758.558	100	45.130.690	85,54	7.627.868
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.494.201	100	41.116.186	81,43	9.378.015
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.658.900	100	33.537.980	96,77	1.120.920
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.600.000	100	8.600.000	63,24	5.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.090.000	100	18.992.500	94,54	1.097.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.107.433	97,24	213.098.508	91,03	21.008.925
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000	66,66	13.154.000	99,65	46.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.511.000	100	157.509.000	86,78	24.002.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.511.000	100	157.509.000	86,78	24.002.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.164.180	86,16	631.612.378	91,78	56.551.802
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	490.992.000	100	444.032.375	90,44	46.959.625
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197.172.180	0	187.580.003	95,14	9.592.177
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.667.700	93,66	885.597.117	87,88	96.070.583
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.701.700	104,17	41.309.593	99,06	392.107
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.180.000	104,17	152.335.934	89,51	17.844.066
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.950.000	78,47	135.187.150	90,62	14.062.850

Perencanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	619.836.000	91,75	556.064.440	86,09	63.771.560
---	-------------	-------	-------------	-------	------------

2. Opini BPK

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	REALISASI				SISA
	ANGGARAN	FISIK	KEUANGAN	%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.680.695.620	81,6	2.524.680.053	96,14	156.015.567
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.745.513.158	88,91	1.661.738.187	95,2	83.774.971
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	78.506.312	100	76.514.961	97,46	1.991.351
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	52.833.996	100	52.470.495	99,31	363.501
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35.903.449	100	35.150.090	97,9	753.359
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	38.865.257	100	38.328.648	98,62	536.609
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	123.858.234	100	123.742.800	99,91	115.434
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	77.436.990	55	76.391.703	98,65	1.045.287
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	446.557.636	82,5	423.740.980	94,89	22.816.656
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	562.525.259	85,66	550.766.194	97,91	11.759.065
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	214.999.892	100	191.495.516	89,07	23.504.376
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	114.026.133	100	93.136.800	81,68	20.889.333
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	398.650.706	88,82	392.697.364	99,18	5.953.342
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	59.653.264	85,01	58.343.900	98,47	1.309.364
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	57.610.698	85	54.403.764	94,43	3.206.934

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	281.386.744	90,4	279.949.700	100,31	1.437.044
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	450.201.710	70,07	397.870.025	88,38	52.331.685
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	139.068.214	79,69	129.370.857	93,03	9.697.357
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	89.910.342	70,28	80.742.025	89,73	9.238.317
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100.804.744	77,36	99.680.566	98,88	1.124.178
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	36.944.430	51,88	29.332.361	79,4	7.612.069
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.003.432	61,67	5.776.466	96,22	226.966
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	45.424.082	68,76	40.344.850	88,82	5.079.232
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31.976.466	29,17	12.622.900	39,48	19.353.566
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	271.839.851.448	81,57	255.950.771.453	96,16	15.889.079.995
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	259.343.607.316	81,67	248.002.012.952	95,63	11.341.594.364
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.302.500.053	95	6.109.685.600	122,14	3.192.814.453
Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.193.744.079	0	1.839.072.901	99,99	1.354.671.178
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	101.794.327	82,68	89.605.000	88,03	12.189.327

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	101.794.327	82,68	89.605.000	88,03	12.189.327
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	935.182.462	62,35	862.941.866	92,28	72.240.596
Pengelolaan Barang Milik Daerah	935.182.462	62,35	862.941.866	92,28	72.240.596
Penyusunan Standar Harga	53.244.190	61,67	44.747.800	84,04	8.496.390
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	34.843.440	34,38	34.603.610	99,31	239.830
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	28.988.732	33,21	20.891.571	72,07	8.097.161
Penatausahaan Barang Milik Daerah	591.452.640	71,77	585.033.095	98,91	6.419.545
Pengamanan Barang Milik Daerah	59.445.032	44,19	46.631.060	78,44	12.813.972
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.449.466	48	3.780.320	58,61	2.669.146
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	44.594.390	18,89	31.715.850	71,12	12.878.540
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18.908.212	90	16.958.735	89,69	1.949.477
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.105.614	90	44.772.292	99,26	333.322
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	52.150.746	16,88	33.807.533	64,83	18.343.213

3 Indeks Kemandirian Fiskal

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			SISA
		FISIK	KEUANGAN	%	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.526.228.068	73,16	1.472.620.697	175,05	53.607.371
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.526.228.068	73,16	1.472.620.697	175,05	53.607.371
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	12.138.680	69,99	11.779.222	100	359.458
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	65.181.800	86,6	61.020.300	95,41	4.161.500

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	39.513.400	62,33	27.828.923	70,43	11.684.477
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	359.790.750	73,41	352.788.450	INF	7.002.300
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	131.667.980	52	124.531.352	94,58	7.136.628
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	49.070.650	36,11	48.843.469	99,54	227.181
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.000.000	78,13	29.750.762	99,19	243.238
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	239.629.400	42,57	239.331.958	99,88	297.442
Penagihan Pajak Daerah	173.897.600	32,14	161.284.431	92,75	12.613.169
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	32.083.348	81,38	31.337.150	97,66	751.198
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	161.479.450	INF	156.760.222	INF	4.719.228
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	162.122.300	INF	160.684.450	INF	1.437.850
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	69.647.710	58,77	66.674.008	95,73	2.973.702

TABEL 2.3

Realisasi Anggaran, Program Kegiatan yang mendukung Kinerja BPPKAD sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Anggaran awal (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	10
1.	Tercapainya Peningkatan yang Ausanitas dan Berkeadilan	1 Nilai AKSP Peningkat Daerah	100	100	100%	1. Program Peningkat Usaha Perikanan Daerah Kabupaten	26,311,100,368	36,907,664,803	16,616,003,163	63.02	- Hasil penilaian Belkman Berkeadilan oleh Inspektorat Daerah - Hasil Penilaian dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BPPKAD Tahun 2024
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Output BPK	WTP	WTP	100%	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,071,612,832	2,782,690,370	2,608,107,962	94.40	* Total Anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di luar Kegiatan Peningkat Usaha Keunggulan Perikanan Keuangan Daerah adalah perbandingan sebesar Rp. 171.773.200.979,-
		3 Indeks Kemudahan Fisik Daerah	11.50%	12.74%	111%	3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,092,537,362	935,382,462	862,041,866	82.28	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan dan lain, termasuk dari pemerintah pusat. Dengan indikator ini dapat diketahui kondisi keuangan daerah dan vertikal (fiscal vertical subindex) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4 Nilai Kemampuan Inovasi PD	100	99	99%	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,517,147,368	1,426,278,068	1,472,603,367	96.40	Hasil penilaian saat pengamatan kinerja inovasi pada aplikasi IVA yang diunggah oleh Surat Keputusan Bupati Selam Nomor 500.10.3647/Suppladikang/2023 tentang Pengaturan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari data penilaian index inovasi daerah 2025
Total							61,807,398,170	45,429,038,625	25,051,625,506	54.82	

Pada Tahun 2025 ini sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 Program, 15 Kegiatan dan 66 sub Kegiatan dalam mendukung untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi. Untuk mendukung pencapaian target Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Tahun 2025 mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp.313.904.486.772,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar 277.445.149.656 atau 88,39 % dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah ini;

Tabel 2.4 Realisasi & Capaian Kinerja Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

Kategori	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Output/Outcome) (sesuai Kepmendagri 050-3708/2020)	5		6		7		8		9		10	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Pertumbuhan heterogenitas penjangkauan pemerintahan daerah (%)	100	2.020.771.007,800		313.504.486,772	277.445.149,656		80,00	1.502.364.500,000	80,00	100,00		
		Pertumbuhan luasnya pelayanan publik yang dapat diakses (%)	100	193.111.815,096		36.007.644,003	16.615.900,303		100	200.496.105,244	100,00	100,00		100,00
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	1						1		1,00		100,00	
		Peningkatan Nilai AKIP Pemerintah Daerah (%)	0,011			0,018			0,011		0,01		74,41	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan pelaksanaan dan pelaksanaan kinerja RPJGP/AN	100	1.000.916.503	20	84.652.166	20	64.218.230	80,00	158.102.318	80,00	35,78
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		15				15,00		100,00	35,78
Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	170	334.459.323	34	64.652.166	34	64.218.230	136,00	384.205.244	80,00	84,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	63.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	14	136.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170	276.517.583	6	-	0	-	34,08	75.957.334	20,00	26,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100.000.000.000	20	34.544.618.821	20	34.475.811.675	80,08	107.688.487.810	80,08	314,34

Proyeksi Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3773	165.501.846,451	728	34.307.509,821	728	14.239.561,635	2894,00	191.885.567,786	78,01	115,94
Proyeksi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	1.893.874,173	12	237.250,000	12	237.250,000	48,00	968.877,274	80,00	49,29
Pelaksanaan Penemuan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penemuan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	125.000,000					24,00	14.341,950	40,00	11,47
Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi SKPD	60	278.884,000								
Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Akut Tabat SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tabat SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Akut Tabat SKPD	35	278.884,000								
Pengalokasian dan Pengalokasian Belanja Anggaran Pemerintah	Jumlah Dokumen Belanja Anggaran Pemerintah dan Tagihan Lanjut Pemerintah	5	140.000,000								
Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Delapan (Tribunal/Seleksi) SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Belanja Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Belanja Triwulan/ Semesteran SKPD	100	179.160,000								
Proyeksi Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	191.164,000								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100	1.097.337,000	70	27.541,000	28	27.458,000	20,00	27.458,000	20,00	2,50
Proyeksi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	115.440,000								

Pengawasan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milk Daerah SKPD	3	148.300.000	2	27.541.000	2	27.458.800	1.00	20.00	18.20
Kasidinas dan Berikan barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Milk Daerah dan Hasil Kasidinas Pemeriksaan Barang Milk Daerah SKPD	5	237.447.000							
Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	5	288.744.000							
Kolaborasi dan Pengawasan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Kolaborasi dan Penyelidikan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	2	119.440.000							
Pendataan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeriksaan Barang Milk Daerah pada SKPD	60	119.440.000							
Pengawasan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Barang Milk Daerah SKPD	60	87.608.000							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.614.000.000	0	-	0	-	0.00	0.00	0.00
Pengawasan Pelanggaran Dan Beresita Attribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pelanggaran Dan Beresita Attribut Kelengkapan	5	231.000.000							
Pendataan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian	60	150.000.000							
Pendataan dan Pengawasan Berkeseluruhan Tugas dan Fungsi yang Berkeseluruhan Tugas dan Fungsi	Jumlah Program Berkeseluruhan Tugas dan Fungsi yang Berkeseluruhan Tugas dan Fungsi	3180	179.000.000	0	-					

Pengadaan Barang Milik Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100	8,775,566,514	20	181,511,999	20	157,509,000	86.00	1,964,268,390	90.00	12.17
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlukan	5	3,317,003,410								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlukan	5	3,254,740,000								
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diperlukan	100	250,000,000	-	-	0	-	63.00	148,560,000	63.00	59.26
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlukan	100	238,420,804	19	181,311,000	19	157,509,000	43.00	371,405,130	43.00	155.79
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	3	225,000,000								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	2	650,000,000								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan	10	650,000,000								
Pengadaan Jasa Perbaikan Terasa Persekitaran Daerah	Pemenuhan kebutuhan jasa perancangan teras persekitaran daerah	100	3,316,131,379	20	588,564,380	20	431,611,477	79.00	2,183,499,441	79.00	54.27
Pengadaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan dan Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	60	1,030,316,617	12	490,902,000	12	444,032,379	48.00	1,447,407,725	48.00	137.30
Pengadaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan dan Pemeliharaan Urutan Kantor yang Diperlukan	60	1,265,821,113	12	397,172,180	12	107,530,100	48.00	725,871,718	48.00	58.13

	Penelitian tentang Misi Daerah yang berfokus pada	Penelitian tentang Misi Daerah yang berfokus pada	100	3.600.000,000	30	981.667,200	20	805.071,117	70,00	3.565.035,445	70,00	100,14
	Penelitian Jari	Jumlah kendaraan										
	Penelitian, Biaya	Penelitian, Biaya	5	194.110,500	1	41.701,700	1	41.701,550	4,00	167.008,600	80,00	85,31
	Penelitian, Pajak	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar/pas Pajaknya										
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan	165	1.454.134,070	31	170.180,000	33	152.315,924	135,00	919.122,976	81,82	62,78
	Penelitian, Pajak dan	Operasional dan Laporan yang dipelihara dan dibayar/pas Pajaknya dan										
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan	605	372.000,103	126	140.590,000	120	115.887,150	480,00	484.811,823	80,00	108,82
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	15	1.250.802,090	2	619.836,000	2	350.064,440	11,00	2.874.297,787	73,33	138,61
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan										
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	100	1.012.921,878,000	20	274.836,011,349	20	258.498,182,825	80,00	1.298.409,665,214	80,00	71,18
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	100	1.012.921,878,000	20	274.836,011,349	20	258.498,182,825	100,00	1.298.409,665,214	100,00	71,18
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	7		7		7	7,00	7,00		100,00	
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	100		100		100	100,00	100,00		100,00	
	Penelitian, Pajak dan	Jumlah kendaraan dan	100	9.649.800,000	20	1.744.113,258	20	1.661.738,243	80,00	7.348.061,791	80,00	79,00

Koordinasi Pengawasan dan Verifikasi Perubahan SKA-SKPD	Jumlah Perubahan SKA-SKPD yang Diverifikasi	315	725.900,000	63	38.803,237	63	38.338,648	252,90	186.030,658	88,00	32,78
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	315	448.800,000	63	123.858,234	63	123.741,809	242,00	461.036,185	88,00	182,84
Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA, SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	315	440.000,000	63	77.656,960	63	76.391,703	243,00	372.695,234	88,00	84,66
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan APBD	10	2.954.500,000	2	446.137,636	2	423.743,960	8,00	2.346,391,099	88,00	83,78
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Perubahan APBD	10	9.027.500,000	2	962.535,200	2	950.766,194	0,00	2.400,882,343	98,00	79,49
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran	10	250.000,000	2	214.899,802	2	191.405,516	9,00	622.211,661	98,00	117,40
Pembinaan dan Pengawasan Daerah Perimbangan	Jumlah uang yang mengalir perimbangan penganggaran Daerah Perimbangan Kabupaten Kota	500	178.000,000	100	114.026,113	100	93.176,800	400,00	189.349,575	88,00	91,87
Koordinasi dan Pengolahan Perencanaan Daerah	Perencanaan Persempitan Daerah yang terdapat dalam pengalokasian perimbangan daerah	100	6.446,817,300	20	398.000,796	20,00	392.097,364	80,00	2.830.214,330	88,00	41,19
	Perencanaan Rancangan Anggaran belanja untuk setiap pelayanan dasar (%)	87		87		87,00		87,00		100,00	41,19
	Perencanaan Persempitan SLPA	42		42		42,00		42,00		100,00	41,19

Pemeriksaan dan Verifikasi Asst, Korwilas, Elakim, Pondopon, Betaja, Pembinaan, Pondopon-LO dan Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Berkas dan Verifikasi Asst, Korwilas, Elakim, Pondopon, Betaja, Pembinaan, Pondopon-LO, dan Dewan	2000	1,350,000,000	692	139,008,214	492	129,330,857	2016,80	704,378,005	81,95	52,21
Korwilas Lampung Korwilas SKPD, BLUD dan Laporan Korwilas Pemerintah Dewan	Jumlah Laporan Korwilas SKPD, BLUD dan Laporan Korwilas Pemerintah Dewan yang Terkorelasikan	5	1,870,000,000	1	80,980,342	1	80,742,023	4,00	43,541,802	80,00	38,87
Korwilas dan Pemeriksaan Rancangan Pembinaan Daerah tersebut Peninggalan Pemeriksaan APMD Provinsi dan Rancangan Pembinaan Kapan Daerah tersebut Peninggalan Peninggalan APMD Pemeriksaan APMD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Pembinaan Daerah tersebut Peninggalan Pemeriksaan APMD Kabupaten/Kota dan Rancangan Pembinaan Kepala Daerah tersebut Peninggalan Peninggalan APMD Kabupaten/Kota	10	825,000,000	2	100,804,748	2	90,680,556	8,00	22,431,292	80,00	65,45
Pemeriksaan Tanggapan Terhadap Lampiran LHP BPK, was Laporan Peninggalan Pemeriksaan APMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tanggapan Terhadap Lampiran LHP BPK, was Laporan Peninggalan Pemeriksaan APMD	25	750,000,000	5	36,444,430	5	29,232,301	10,00	165,670,827	80,00	22,00
Korwilas, Sekretaris, dan Pemeriksaan Terhadap Pembinaan dan Tindakan Kewil Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Korwilas, Sekretaris, dan Pemeriksaan Terhadap Pembinaan dan Tindakan Kewil Daerah	80	100,000,000	0	-	-	-	-	-	-	0,00
Pemeriksaan Analisis Laporan Peninggalan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Peninggalan	5	100,000,000	1	6,000,432	1	5,779,444	1,00	5,779,444	20,00	5,78

	Implementasi dan Perencanaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Perencanaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Keuangan Daerah	10000 0	1,310,000,000	30000	101,794,327	20000	89,807,000	772,800,00	477,763,665	77.24	51.74
	Berbasis Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Keuangan Daerah Perencanaan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bidang Keuangan Daerah Perencanaan Kabupaten/Kota	155	250,000,000								
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BEREKUITAS	OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BEREKUITAS	100	6,094,217,013.88	20	938,182,462	20	862,941,866.00	88.00	3,472,942,038	88.00	56.98
		Pemenuhan Pemeliharaan Nilai Aset tetap (%)	6		6		6		6.00		100.00	56.98
		Aset Management (%)	100		100		100		100.00		100.00	56.98
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengalihan Barang yang terditi dalam penastisruhan RMD	100	6,094,217,013.88	20	938,182,462	20	862,941,866	88.00	3,472,942,038	88.00	56.98
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	425,502,000	1	51,244,190	1	64,747,800	5.00	200,978,154	100.00	47.46
	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah	201	418,693,590	2	34,842,440	2	24,602,610	125.00	189,796,603	90.98	46.32
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	427,000,000	2	24,088,732	2	20,881,571	8.00	88,516,663	90.00	23.73
	Pemenuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Barang Milik Daerah	205	842,131,003	41	997,452,640	41	935,033,000	164.00	1,413,141,644	90.00	107.81

	Investasi Berang Mila Daerah	Jumlah Laporan Hasil Investasi (LHS) Berang Mila Daerah	420	1,044,894,570	0	-	0	-	125.88	199,085,990	24.75	18.28
	Penggunaan Berang Mila Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan Berang Mila Daerah	420	3,000,000,000	1	59,442,022	1	46,611,060	86.08	489,589,408	20.48	48.96
	Penggunaan dan Pengelolaan Berang Mila Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penggunaan dan Pengelolaan Pengelolaan Berang Mila Daerah	5	177,699,000	1	6,449,465	1	3,780,200	2.48	17,614,728	48.00	9.95
	Optimalisasi Penggunaan, Pemasfaatan, Pembelakangan, Pemanfaatan dan Penggunaan Berang Mila Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemasfaatan, Pembelakangan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Berang Mila Daerah	30	830,000,000	3	44,394,390	3	31,715,850	21.08	305,473,750	70.00	48.49
	Eksistensi dalam Rangka Penguatan Laporan Berang Mila Daerah	Jumlah Laporan Hasil Eksistensi dalam rangka Penguatan Laporan Berang Mila Daerah	210	158,241,820	41	13,908,212	41	16,958,735	164.00	169,157,257	80.00	47.22
	Penggunaan Laporan Berang Mila Daerah	Jumlah Laporan Berang Mila Daerah yang Disusun	5	835,552,000	1	45,105,614	1	44,772,297	4.00	369,284,446	80.00	61.83
	Pembinaan dan Pengelolaan Berang Mila Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pembinaan Penguatan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota	350	389,000,000	70	62,160,766	70	33,817,533	240.00	139,333,433	68.57	48.21
- Menyalurkan Aksesibilitas ke Pengelolaan Kewenangan Daerah	Program Pengelolaan Pengelolaan Berang	Rantai PAD	2,16	8,439,997,721	0.43	1,236,228,848	0.43	1,472,620,697	1.72	4,612,446,964	79.40	76.53
- Menyalurkan Kualitas Berang Daerah												

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHT/B)	Jumlah Check Pajak yang Diinputkan NUP nya	25000	133,000,000	5000	40,070,050	90000	48,841,409	25000,000	48,841,409	150,00	36,72
Pencetakan Wajah Pajak Daerah	Jumlah Deklamasi Kotak-kotak Pajak Daerah	20	128,000,000			0	-				6,00
Pelaporan dan kawatir pajak daerah	Jumlah Laporan dan kawatir Pajak Daerah	4000	480,354,300	800	30,000,000	800	20,708,702	3,430,00	165,108,626	68,75	27,96
Pencetakan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Diakukan Penilaian dan Verifikasi	82500 0	488,121,583	105000	230,425,400	305000	259,331,958	900000,00	853,711,841	68,61	99,49
Pengajuan Pajak Daerah	Jumlah Deklamasi Hasil Pelaksanaan Pengajuan Pajak Daerah	87500 0	1,477,532,500	175000	173,897,600	175000	161,284,431	700000,00	1,314,962,870	88,00	66,43
Pengajuan kawatir pajak Daerah	Jumlah Deklamasi Hasil Pengajuan kawatir Pajak Daerah	1000	288,022,200	20	33,088,348	50	31,337,150	580,00	154,631,776	58,00	54,14
Pengajuan, pemeriksaan dan pengajuan pajak daerah	Jumlah Deklamasi Hasil Pemeriksaan dan Pengajuan Pajak Daerah	20	411,443,304	4	161,475,630	4	156,705,222	16,00	412,948,496	88,00	88,76
Pencetakan dan pengajuan pengajuan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengajuan dan Pengajuan Pengajuan Hasil Daerah	20	128,000,000	4	162,322,300	4	160,684,459	16,00	269,084,790	88,00	176,82
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	20	135,000,000	4	60,647,710	4	60,674,008	8,00	167,023,805	48,00	122,72

Tabel 1 T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027		Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14		15	16	17
1	OPINI LAPORAN KEUANGAN	-	-	WTP	WTP	WTP				WTP	WTP	WTP	-	-		-	-	-
2	Indeks Kemandirian Fisikal Daerah	-	-	8,76%	10,86%	11,50%		-		10,86%	11,01%	12,74%	-	-		-	-	-
3	Nilai AKIP BPKPAD	-	-	A	A (89)	A (90)		-		A	A (89,71)	A (88,41)	-	-		-	-	-
4	Nilai Kematangan Inovasi PD Keuangan	-	-	100	100	100		-		97	98	99	-	-		-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah, adalah kelemahan peraturan perundang-undangnya sendiri, sehingga menimbulkan kelemahan yang cukup luas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi lebih dalam persoalan tersebut, terutama melihat dari sisi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran daerah, dikaitkan dengan semangat penerapan *good governance*.

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025. Namun telah dilakukan Pergeseran Anggaran terakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang penganggaran, banyak yang belum dijabarkan baik ke dalam Perda maupun Peraturan Bupati. Masing-masing daerah memang berbeda produktivitasnya dalam menerbitkan perda dan sangat dipengaruhi oleh kreativitas jajaran pimpinan daerah dan banyak diantara mereka yang belum dapat melepaskan diri dari paradigma lama menunggu juknis dari pusat. Permasalahan juga timbul karena ketidakkonsistenan dalam rumusan peraturan perundang-undangan kebijakan, khususnya di bidang perencanaan anggaran. Sistem perencanaan anggaran model lama masih digabung dengan sistem baru, sehingga mengakibatkan kerancuan dalam menetapkan arah kebijakan anggaran.

Proses perumusan perda dan proses perencanaan anggaran belum dilandasi dengan semangat *good governance*. Produktivitas perumusan perda hanya untuk

perda-perda yang berorientasi untuk meningkatkan PAD. Dengan kurangnya dukungan SDM dan lemahnya koordinasi serta melibatkan stakeholders dalam perumusan kebijakan, muncullah perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan lain. Pemda juga belum bersungguh-sungguh melibatkan partisipasi masyarakat, seperti; tokoh masyarakat, media massa dan perguruan tinggi. Hal ini terjadi baik dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam perencanaan anggaran, demikian juga dengan masalah transparansi. Hal ini juga terjadi terutama karena kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketidakjelasan pengertian partisipasi masyarakat dan transparansi itu sendiri, belum diatur hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemda dan kewajiban pemda untuk memberikan informasi, dan jenis-jenis informasinya, tidak jelas batasannya.

Di lain pihak, masyarakat pun masih lemah dalam memahami sistem informasi/digitalisasi Pengelola Keuangan, pendapatan dan aset daerah. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, para penyelenggara pemerintahan daerah tidak terpacu untuk meningkatkan kinerja secara lebih baik, karena lemahnya pengawasan dari masyarakat.

Berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pembangunan daerah, apapun model yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengisi program-program dan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan anggaran daerah pada akhirnya tetap tidak akan efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada dasar hukum yang dapat memaksa pemerintah daerah untuk bertransparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Akibatnya, usulan-usulan kegiatan masih tetap didominasi oleh aspirasi pemerintah. Adapun Hambatan utama pada penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga konsultan/operator dari luar.
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Selain itu dalam perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran adalah koordinasi antara pemda dengan pemda lainnya maupun dengan pusat dan stakeholder lainnya di daerah. Kelemahan koordinasi antara lain juga disebabkan oleh kelemahan perundang-undangan yang ada. Berkaitan dengan hal di atas, perlunya saran kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah agar segera menjabarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang sangat krusial keberadaannya dan menyarankan beberapa hal lainnya agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

Sedangkan mengenai kinerja pendapatan keuangan kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari indeks kemandirian fiskal daerah. Secara garis besar, permasalahan di BPKPAD dapat dirumuskan pada tabel berikut:

TABEL 2.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN PD
Peningkatan sumber daya aparatur keuangan	Belum optimalnya kemampuan individu akan tantangan dan trobosan dalam perkembangan iptek sejalan dengan kebutuhan organisasi	Terwujudnya Mutu Pelayanan Administrasi keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang lebih baik	Mutasi pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pendapatan dan aset daerah	Laporan Pertanggung jawaban keuangan setiap perangkat daerah belum tepat wu	Peningkatan pelayanan terhadap Perangkat daerah
			Belum maksimalnya pengembangan kemampuan pengelolaan Keuangan dan pendapatan dengan berbasis IT yang akuntabel	Persamaan persepsi tentang Pengelolaan keuangan dan Pendapatan pada Perangkat daerah belum Merata	

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	INTERNAL (KEWENANGAN PD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PD)	PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN PD
Peningkatan sarana dan prasarana penunjang manajemen pengelolaan keuangan Pendapatan dan aset daerah	Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kepada masyarakat	Kualitas Pelayanan Berdasarkan Ukuran Indikator Kinerja Utama	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana bagi pegawai	Belum mampu di Akomodasi Kebutuhan Peningkat daerah dalam sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana
Optimalisasi penataan aset daerah	Belum efektifnya pengelolaan aset daerah	Tertib Pengelolaan aset daerah mendukung akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan daerah	Kurangnya Jumlah SDM pengelola Aset Daerah yang berbasis IT	Data spesifikasi aset daerah pada setiap opd belum lengkap dan disajikan pada aplikasi penatausahaan aset daerah	Tertib pengelolaan Aset daerah
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD	Belum Optimalnya pengawasan dan pengendalian	Belum maksimalnya kemampuan SDM pengelola aset daerah yang berbasis IT Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional atau regional akibat pandemi, fluktuasi komoditas, atau krisis global- secara otomatis menekan basis pajak	

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, maka isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepan, adalah:

1. Meningkatkan kemampuan teknis SDM Perangkat Daerah Melalui Profesionalitas Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Perkembangan Iptek;
Ukuran ataupun indikator atas profesionalisme adalah bagaimana pelaksanaan dilapangan ataupun pekerjaan sesuai dengan penetapan prosedur kerja yang telah

ditetapkan. Kredibilitas dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan sendiri sebagai sebuah instansi yang dituntut untuk dapat bekerja secara profesional adalah sebagai keharusan untuk dapat mendapatkan kepercayaan dari publik karena sifat dan pekerjaan dari BPKPAD ini adalah sebagai pelayanan publik. Profesionalisme ini sangat tergantung dari pendayagunaan dan pengoptimalisasian pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas SDM dan Koordinasi Internal sesuai Perundang-undangan. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan Pendapatan dan Aset Daerah faktor sarana dan prasarana sangatlah penting. Ketika tuntutan akan profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi menjadi sebuah keharusan maka hal tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. Sehingga indikator keberhasilan ataupun evaluasi pelaksanaan dilapangan akan terlihat jelas. Faktor ini sangat berpengaruh pada kualitas dan koordinasi internal. Adapun peningkatan sarana dan prasarana ini tentunya mengacu pada perundang-undangan yang ada. Harus diakui bahwa untuk mencapai garis ideal ternyata dalam pengaplikasian dilapangan tidaklah mudah. Banyaknya variabel yang sangat signifikan mempengaruhi disandingkan dengan dana yang terbatas juga merupakan indikator penghambat. Oleh karenanya untuk memberikan pelayanan yang ideal dan sesuai dengan teori yang ada tentunya masih memerlukan langkah yang panjang. Tetapi dengan keterbatasan ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tetap berkomitmen untuk bekerja mensukseskan Visi dan Misi yang telah ditetapkan
3. Menyusun regulasi terkait Pengelola Keuangan, asset dan pendapatan daerah sebagai acuan kerja bagi seluruh *stakeholder*;
4. Meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi terkait Pengelolaan keuangan;
5. Menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak sehingga potensi pajak daerah bisa dioptimalkan sebagai upaya untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Daerah;

6. Mengoptimalkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah;
7. Melakukan efektivitas dalam pemilihan program kegiatan untuk pencapaian kinerja;
8. Mengoptimalkan dan memprioritaskan penganggaran yang menunjang pelayanan publik.
9. Meningkatkan PAD melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan alat bantu berupa aplikasi perencanaan berbasis web dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Alur proses dimulai dari mengentri rancangan awal renja diaplikasi perencanaan yang selanjutnya otomatis tersalin ke dalam rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja.

Perencanaan Program dan kegiatan BPKPAD pada Tahun 2027 dalam rancangan Awal ada 4 Program 14 kegiatan dan 71 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.284.676.601.585,- . Untuk melihat review terhadap Rencana Awal dan analisis kebutuhan tersebut dapat dilihat pada tabel T.C 31.

Tabel T-C 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD TAHUN 2027 Kabupaten Pesisir Selatan

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2027		BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF 2027		
		TARGET	PAGU			TARGET	KEBUTUHAN DANA	
5.02 - KEUANGAN 5.02.01 - PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			404.532.402.675,00	5.02 - KEUANGAN 5.02.01 - PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			284.676.601.185,00 31.340.501.109,00	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1,00	69.846.541.000,00	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	1,00	31.340.501.109,00	
	Persentase Kinerja Bidang/ Sekretariat yang dianggotai (%)	100,00			Persentase Kinerja Bidang/ Sekretariat yang dianggotai (%)	100,00		
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,02			Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,02		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			202.800.000,00	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.680.000,00	
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9,00	202.800.000,00	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9,00	57.680.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pembangunan Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pembangunan Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Ditampilkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Ditampilkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00		

5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berisikan Bidang Urusan yang Diatur dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berisikan Bidang Urusan yang Diatur dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2,00					
5.02.01.2.01.0002 - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD yang disusun (Dokumen)	3,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD yang disusun (Dokumen)	3,00					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15,00					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2,00					
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1,00	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00					
						66.000.000,00	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57.640.000,00
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15,00		66.000.000,00	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57.640.000,00
						12.000.000,00	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	12.000.000,00	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			11.100.000,00	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	11.100.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.000.000,00	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1,00	12.000.000,00	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1,00
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			11.100.000,00	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2,00	11.100.000,00	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD			15.900.000,00	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	15.400.000,00	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.100.000,00	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9,00	11.100.000,00	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	9,00
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah			15.500.000,00	5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah		
Tertindakannya Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00	15.500.000,00	Tertindakannya Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1,00
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			15.500.000,00	5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diportoksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00	15.500.000,00	Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diportoksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1,00
5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.500.000,00	5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Tertindakannya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00	17.500.000,00	Tertindakannya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1,00
5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD			15.500.000,00	5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD		
Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD yang disusun (Dokumen)	1,00	15.500.000,00	Tertindakannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rencana PD dan Rencana PD yang disusun (Dokumen)	1,00
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			65.813.316.000,00	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		

Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1,00	65.813.336.000,00	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1,00	28.609.882.654,09
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	756,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	756,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semesteran SKPD (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulsi/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Tugasan Penerimaan dan Tidak Laju Penerimaan (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Bahan Tugasan Penerimaan dan Tidak Laju Penerimaan (Dokumen)	1,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00			Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	
	Jumlah Dokumen Penuntutan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00			Jumlah Dokumen Penuntutan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00	
5.02.01.2.02.0001 - Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN			65.500.000.000,00	5.02.01.2.02.0001 - Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN			28.364.762.638
Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	756,00	65.500.000.000,00	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	756,00	28.364.762.638
5.02.01.2.02.0002 - Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			270.336.000,00	5.02.01.2.02.0002 - Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			244.920.000,00

Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	270.336.000,00	Terselenggaranya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12,00	244.920.000,00
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD			15.500.000,00	5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/ Verifikasi Keuangan SKPD			
Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	15.500.000,00	Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD			5.500.000,00	5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD			
Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	1,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD (Dokumen)	1,00	
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.500.000,00	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1,00	
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Taggapan Pemeriksaan			5.500.000,00	5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Taggapan Pemeriksaan			
Terselenggaranya Dokumen Bahan Taggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Taggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Dokumen Bahan Taggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Taggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1,00	
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD			5.500.000,00	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD			
Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)		5.500.000,00	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD (Dokumen)		

Tersediaanya Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1,00	5.500.000,00	Tersediaanya Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1,00
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.500.000,00	5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
Tersediaanya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00	5.500.000,00	Tersediaanya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			81.700.000,00	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Tersediaanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas (Dokumen)	12,00	81.700.000,00	Tersediaanya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas (Dokumen)	12,00
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Rekonstruksi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00
	Jumlah Rencana Kelembahan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12,00			Jumlah Rencana Kelembahan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12,00
	Jumlah Rencana Kelembahan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00			Jumlah Rencana Kelembahan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00

5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD			15.500.000,00	5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD			
Terselenggaranya Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	15.500.000,00	Terselenggaranya Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1,00	15.500.000,00
5.02.01.2.03.0002 - Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD			23.100.000,00	5.02.01.2.03.0002 - Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD			
Terselenggaranya Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	12,00	23.100.000,00	Terselenggaranya Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12,00	23.100.000,00
5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			11.100.000,00	5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
Terselenggaranya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1,00	11.100.000,00	Terselenggaranya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1,00	11.100.000,00
5.02.01.2.03.0004 - Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			15.500.000,00	5.02.01.2.03.0004 - Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Terselenggaranya Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	15.500.000,00	Terselenggaranya Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	15.500.000,00
5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.500.000,00	5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12,00	5.500.000,00
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.500.000,00	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1,00	5.500.000,00

5.02.01.2.05.0003 - Pendirian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.400.000,00	5.02.01.2.05.0003 - Pendirian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			
Tertaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2,00	5.400.000,00	Tertaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2,00			
5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.500.000,00	5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				
Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	5.500.000,00	Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00			
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.500.000,00	5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				
Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	5.500.000,00	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00			
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	95.000.000,00	5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10.000.000,00		
Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,00	95.000.000,00	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,00			
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25.000.000,00	5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1,00	25.000.000,00	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1,00			
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30.000.000,00	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2,00	30.000.000,00	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2,00			

5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	588.234.000,00	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30,00	406.584.431,00
	Jumlah Paket Perawatan Rutuh Tenggus yang Disediakan (Paket)	1,00			Jumlah Paket Perawatan Rutuh Tenggus yang Disediakan (Paket)	1,00	
	Jumlah Paket Perawatan dan Perlembagaan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00			Jumlah Paket Perawatan dan Perlembagaan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1,00			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300,00	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12,00	
	Jumlah Dokumen Penunjang Asap Dikawatir pada SKPD (Dokumen)	12,00			Jumlah Dokumen Penunjang Asap Dikawatir pada SKPD (Dokumen)	12,00	
	Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Penunjang Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	24,00			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Penunjang Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	24,00	
5.02.01.2.06.0001 - Penyelenggaraan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			60.500.000,00	5.02.01.2.06.0001 - Penyelenggaraan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			41.000.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	60.500.000,00	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	41.000.000,00

5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10.000.000,00	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20.000.000,00
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.500.000,00	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	29.942.140,00
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	64.926.000,00	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24.016.400,00
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30.753.000,00	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13.400.000,00
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	13.600.000,00	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	13.600.000,00
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15.500.000,00	5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan (Paket)	10.000.000,00
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	22.687.000,00	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	250.625.711,00
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat	339.268.000,00	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250.625.711,00
5.02.01.2.06.0010 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	22.687.000,00	5.02.01.2.06.0010 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	250.625.711,00
5.02.01.2.06.0011 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat	339.268.000,00	5.02.01.2.06.0011 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250.625.711,00

5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000.000,00	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1,00	250.000.000,00	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1,00	
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel			160.000.000,00	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20,00	57.860.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20,00	160.000.000,00	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20,00	57.860.000,00
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			168.000.000,00	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			144.582.000,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18,00	168.000.000,00	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18,00	144.582.000,00
5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya			60.000.000,00	5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	60.000.000,00	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1,00	
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Perangai Urusan Pemerintahan Daerah			721.995.000,00	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Perangai Urusan Pemerintahan Daerah			1.177.112.000,00
Terpenuhiya jasa perangai urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	721.995.000,00	Terpenuhiya jasa perangai urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	1.177.112.000,00
	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	
	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	
	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.500.000,00	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Terlaksananya Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	5.500.000,00	Terlaksananya Penyelidikan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	

5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000,00			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		513.200.000,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	513.200.000,00
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	15.500.000,00					
Tersedianya Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1,00	663.912.000,00
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.995.000,00					663.912.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	882.000.000,00
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.257.476.000,00					
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	882.000.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelebara (Unit)	3,00			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelebara (Unit)	3,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/ Dikebalkan (Unit)	2,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/ Dikebalkan (Unit)	2,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	33,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelebara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	33,00	
	Jumlah Mebel yang Dipelebara (Unit)	26,00			Jumlah Mebel yang Dipelebara (Unit)	26,00	

5.02.01.2.99.0007 - Penceluhan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10.000.000,00	5.02.01.2.99.0007 - Penceluhan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		10.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3,00		
5.02.01.2.99.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		745.631.000,00	5.02.01.2.99.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		550.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahdini (Unit)	745.631.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,00		
5.02.01.2.99.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.000.000,00	5.02.01.2.99.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirubahdini (Unit)	25.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00		
5.02.01.2.99.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondok Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		50.000.000,00	5.02.01.2.99.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondok Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondok Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pondok Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahdini (Unit)	50.000.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pondok Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH		332.051.887.713,00	5.02.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH		251.331.164.773,00	
Memungkinkannya untuk kelola akutansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	Memungkinkannya untuk kelola akutansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	6,00		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	6,00	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	80,00		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	80,00	

	Jumlah Kegiatan dan Pembuatan Teknis Operasional Penyenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00		Jumlah Kegiatan dan Pembuatan Teknis Operasional Penyenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00
	Jumlah Dokumen Tugas-tugas/ Tinjauan Lanjut Terhadap LHP BPK, atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00		Jumlah Dokumen Tugas-tugas/ Tinjauan Lanjut Terhadap LHP BPK, atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L.O. dan Beban (Dokumen)	540,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban (Dokumen)	540,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5,00
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1,00		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1,00
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah		391.588.650,00
	11.100.000,00				
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban		12,00	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban		391.588.650,00
	11.100.000,00				
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban		75.000.000,00
	126.744.000,00				
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban		540,00	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan- L.O. dan Beban		75.000.000,00
	126.744.000,00				

5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			11.100.000,00	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Terselenggaranya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18,00	11.100.000,00	Terselenggaranya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18,00	100.249.950,00
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			102.000.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Terselenggaranya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1,00	102.000.000,00	Terselenggaranya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	1,00	100.249.950,00
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			111.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota			104.101.200,00
Terselenggaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2,00	111.000.000,00	Terselenggaranya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2,00	104.101.200,00
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/ Indik Lanjut Terhadap LHP BPK dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			61.128.000,00	Penyusunan Tanggapan/ Indik Lanjut Terhadap LHP BPK dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			63.144.300,00

Tersediannya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00	61.128.000,00	Tersediannya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00	63.144.300,00
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		11.100.000,00	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
Tersediannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5,00	11.100.000,00	Tersediannya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyusunan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5,00	
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		30.600.000,00	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			10.194.600,00
Tersediannya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1,00	30.600.000,00	Tersediannya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1,00	10.194.600,00
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		76.500.000,00	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
Tersediannya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	76.500.000,00	Tersediannya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		11.100.000,00	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Tersediannya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	11.100.000,00	Tersediannya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	

5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	81.561.000,00	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota			18.898.000,00
Tertindakannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	81.561.000,00	Tertindakannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	124,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	38.898.000,00
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	11.100.000,00	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota			
Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	11.100.000,00	Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	1,00	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang Dibina (Lembaga)	1,00
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	11.100.000,00	5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			
Tertindakannya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota	11.100.000,00	Tertindakannya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1,00	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Laporan)	1,00
Meningkatnya tata kelola anggaran	1.790.545.000,00	Meningkatnya tata kelola anggaran	40,00	Penertasan Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Gaji yang Dialokasikan melalui TKD (%)	40,00
		Penertasan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	35,00	Penertasan Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	35,00
		Rasio Belanja Pegawai diluar gaji dan tunjangan kesehatan (%)	12,00	Rasio Belanja Pegawai diluar gaji dan tunjangan kesehatan (%)	12,00
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (akunang) transfer expenditures (%)	72,00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (akunang) transfer expenditures (%)	72,00
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.790.545.000,00	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.790.545.000,00	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1,00

5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	2,00				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD (Dokumen)	2,00		
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00				Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pertibuyaan (Dokumen)	1,00				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pertibuyaan (Dokumen)	1,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pertibuyaan (Dokumen)	1,00				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Pertibuyaan (Dokumen)	1,00		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00		
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Keputusan Bidang Anggaran (Dokumen)	2,00				Jumlah Dokumen Regulasi serta Keputusan Bidang Anggaran (Dokumen)	2,00		
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00				Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	100,00				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	100,00		
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	2,00				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD (Dokumen)	2,00		
	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00				Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00		
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00		
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		71.471.000,00	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		51.242.300,00				

Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	71.471.000,00	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	51.242.300,00
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			64.004.000,00	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			51.909.475,00
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	64.904.000,00	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00	51.909.475,00
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			54.124.000,00	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			33.610.850,00
Tersusunnya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	54.124.000,00	Tersusunnya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	33.610.850,00
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			29.766.000,00	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			31.045.450,00
Tersusunnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	29.766.000,00	Tersusunnya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	31.045.450,00
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			113.369.000,00	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			79.550.250,00
Tersusunnya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	113.369.000,00	Tersusunnya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	79.550.250,00
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			104.332.000,00	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			75.161.400,00
Tersusunnya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	104.332.000,00	Tersusunnya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40,00	75.161.400,00
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			516.155.000,00	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			462.528.320,00
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2,00	516.155.000,00	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2,00	462.528.320,00

Tertindakannya Perbantuan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	100,00	131.115.000,00	Tertindakannya Perbantuan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	100,00	78.225.136,80
Meningkatkan kemampuan perencanaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja wajib pelayanan dasar (%)	85,00	329.605.209.713,00	Meningkatkan kemampuan perencanaan	Persentase Realisasi Anggaran belanja wajib pelayanan dasar (%)	80,00	
	Persentase Penarikan SILPA (%)	36,00			Persentase Penarikan SILPA (%)	36,00	
	Persentase kepemilikan NPWP (%)	18,23			Persentase kepemilikan NPWP (%)	18,23	
	Rasio Anggaran sisa terdapat dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,10			Rasio Anggaran sisa terdapat dalam APBD tahun sebelumnya (%)	4,10	
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolan Perencanaan Daerah dan Pengelolan Perencanaan Daerah			476.372.000,00	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolan Perencanaan Daerah dan Pengelolan Perencanaan Daerah			357.445.791,90
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Pembinaan Daerah (Dokumen)	2,00	476.372.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Pembinaan Daerah (Dokumen)		2,00	357.445.791,90
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembinaan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	160,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pembinaan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		160,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Data Pemantauan dan Pengelolan Kas serta Pemantauan dan Pemantauan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Data Pemantauan dan Pengelolan Kas serta Pemantauan dan Pemantauan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)		12,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)		1,00	

Jumlah Laporan Realisasi Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemeriksaan/ Pemeriksaan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi/ Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemeriksaan/ Pemeriksaan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) (Laporan)	4,00	Jumlah Laporan Realisasi Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemeriksaan/ Pemeriksaan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi/ Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemeriksaan/ Pemeriksaan dan Penyusunan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) (Laporan)	4,00
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kategori/ Kota (Orang)	134,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kemampuan Kategori/ Kota (Orang)	134,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Sistemasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Data Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	658,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Sistemasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Data Pembiayaan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	658,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	444,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	444,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1,00
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas serta Pencatatan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2,00	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemeriksaan dan Pengelolaan Kas serta Pencatatan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2,00
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Prizang	4,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Prizang	4,00

	dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembinaan dan Penguatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)					Pinang dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembinaan dan Penguatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)		
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				69.360.000,00		5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		51.950.000,00
Tertindakannya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		444,00		69.360.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	444,00	51.950.000,00
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				5.500.000,00		5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Tertindakannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1,00		5.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1,00	
5.02.02.2.02.0003 - Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemeliharaan Anggaran Kas dan SPD				5.500.000,00		5.02.02.2.02.0003 - Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemeliharaan Anggaran Kas dan SPD		
Tertindakannya Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemeliharaan Anggaran Kas dan SPD		160,00		5.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemeliharaan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	160,00	
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembinaan Daerah				5.500.000,00		5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembinaan Daerah		
Tertindakannya Penatausahaan Pembinaan Daerah		2,00		5.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembinaan Daerah (Dokumen)	2,00	
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				62.198.000,00		5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		56.629.500,00

Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Stokristensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Stokristensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	658,00	62.100.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Stokristensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asisten, Stokristensi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	658,00	56.029.500,00
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			5.500.000,00	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1,00	5.500.000,00	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1,00	
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK)			5.500.000,00	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK)			
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK) (Laporan)	4,00	5.500.000,00	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja Sama, dan Pelaksanaan Perencanaan/Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Fiskal Ketiga (PFK) (Laporan)	4,00	

Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penarikan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penarikan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2,00	11.100.000,00	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penarikan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penarikan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2,00
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota			389.614.000,00	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota (Orang)	134,00	289.614.000,00	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota (Orang)	134,00
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Daerah			128.647.792.713,00	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Daerah		249.041.281.115,00
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	328.647.792.713,00	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	249.041.281.115,00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Pokok dan Bangunan Prasarana Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Pokok dan Bangunan Prasarana Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penarikan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penarikan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penarikan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penarikan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00

	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Keuangan (Laporan)	12,00		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Keuangan (Laporan)	12,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelompokan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota (Laporan)	12,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelompokan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota (Laporan)	12,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelompokan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelompokan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12,00	
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Ketetapan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1,00		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Ketetapan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1,00	
5.02.02.2.04.0001 - Pengelompokan Dana Cadangan Pemerintah Daerah			11.100.000,00	5.02.02.2.04.0001 - Pengelompokan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		
Terkelompoknya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelompokan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00	11.100.000,00	Terkelompoknya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelompokan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1,00
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah			11.100.000,00	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah		
Terkelompoknya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00	11.100.000,00	Terkelompoknya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah			11.100.000,00	5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah		241.096.837.600,00
Terkelompoknya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00	11.100.000,00	Terkelompoknya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			11.100.000,00	5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cukai Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Terkelompoknya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	1,00	11.100.000,00	Terkelompoknya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	1,00

Terkelompoknya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12,00	3.322.771.000,00	Terkelompoknya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	12,00	2.944.423.515,00
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			181.045.000,00	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			72.079.600,00
Terkelompoknya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	17.240,00	181.045.000,00	Terkelompoknya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	17.240,00	72.079.600,00
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1,00			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kota (Orang)	179,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kota (Orang)	179,00	
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			11.100.000,00	5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			
Terkelompoknya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1,00	11.100.000,00	Terkelompoknya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1,00	
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			158.845.000,00	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			
Terkelompoknya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	17.240,00	158.845.000,00	Terkelompoknya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	17.240,00	
5.02.02.2.05.0003 - Pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang			11.100.000,00	5.02.02.2.05.0003 - Pembiayaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang			249.466.291,00

Kemampuan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	179,00	11.100.000,00	Terkaitnya Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	179,00	11.100.000,00	Terkaitnya Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	179,00	209.466.291,00
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.179.724.883,00	1.179.724.883,00	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.179.724.883,00	1.179.724.883,00	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.179.724.883,00	209.466.291,00
Meningkatnya nilai kelola aset daerah	Perentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6,52	100,00	Meningkatnya nilai kelola aset daerah	Perentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6,52	100,00	Perentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	Perentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	6,52	100,00
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	40,00	1.179.724.883,00	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	40,00	1.179.724.883,00	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	40,00	1.179.724.883,00
Terkaitnya BMD dengan baik	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00		Terkaitnya BMD dengan baik	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00		Terkaitnya BMD dengan baik	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00	
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	70,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	70,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	70,00	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	41,00			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	41,00			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	41,00	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	

	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHD) Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHD) Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1,00			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1,00	
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemasukan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	15,00			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemasukan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	15,00	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga Terselanjutnya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00	55.873.000,00	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga Terselanjutnya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00	42.509.650,00
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			10.000.000,00	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			42.509.650,00
Terselanjutnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		2,00	10.000.000,00	Terselanjutnya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		2,00	
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			53.427.500,00	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			23.071.050,00
Terselanjutnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		40,00	53.427.500,00	Terselanjutnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		40,00	23.071.050,00
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			60.800.000,00	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			36.179.750,00
Terselanjutnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2,00	60.800.000,00	Terselanjutnya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2,00	36.179.750,00
5.02.03.2.01.0005 - Pematruhan Barang Milik			683.135.800,00	5.02.03.2.01.0005 - Pematruhan Barang Milik			345.136.000,00

Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	683.335.000,00	Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	385.136.000,00
Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah				Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	14.182.000,00	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah (Laporan)	40,00	
Tertindakannya Inventarisasi Barang Milik Daerah				Tertindakannya Inventarisasi Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0007 - Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Milik Daerah (Laporan)		48.508.000,00	5.02.03.2.01.0007 - Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Milik Daerah (Laporan)		53.271.635,00
Tertindakannya Pengawasan Barang Milik Daerah				Tertindakannya Pengawasan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	13.987.383,00	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	53.271.635,00
Tertindakannya Penilaian Barang Milik Daerah				Tertindakannya Penilaian Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (Laporan)		25.047.000,00	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (Laporan)		25.040.000,00
Tertindakannya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah				Tertindakannya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	25.047.000,00	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	25.000.000,00
Tertindakannya Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Tertindakannya Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
5.02.03.2.01.0011 - Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Laporan)	15,00	99.203.000,00	5.02.03.2.01.0011 - Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Laporan)	15,00	330.000.000,00
Tertindakannya Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				Tertindakannya Optimalisasi Penggunaan, Pemertanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			

5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		30.642.000,00	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		20.237.342,00
Tertindakannya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	41,00	Tertindakannya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	41,00
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		60.520.000,00	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		49.013.710,00
Tertindakannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00	Tertindakannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1,00
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		65.000.000,00	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		43.698.446,00
Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	70,00	Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	70,00
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		1.454.249.079,00	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		946.212.120,00
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		453.871.079,00	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		95,00
Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	4,00	Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	4,00
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.454.249.079,00	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		986.212.120,00
Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	2,00	Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	2,00
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		453.871.079,00	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah		95,00
Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	4,00	Tertindakannya Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Laporan)	4,00

	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2,00			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2,00		
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				25.500.000,00	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			9.565.000,00
Tersebutnya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2,00		25.500.000,00	Tersebutnya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2,00		9.565.000,00
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				80.000.000,00	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			71.510.200,00
Tersebutnya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2,00		80.000.000,00	Tersebutnya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2,00		71.510.200,00
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				34.269.000,00	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			83.406.600,00
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		4,00		34.269.000,00	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4,00		83.406.600,00
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				155.000.000,00	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			70.000.000,00
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		4,00		155.000.000,00	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4,00		70.000.000,00
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Retribusi Daerah				159.102.079,00	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			173.134.800,00
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		4,00		159.102.079,00	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,00		173.134.800,00

Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Retribusi Daerah (Laporan)	90,00	274.059.000,00	Meningkatkan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Retribusi Daerah (Laporan)	90,00
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.454.249.079,00	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1,00	274.059.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1,00
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	4,00			Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	4,00
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			222.059.000,00	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		112.265.650,90
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1,00	222.059.000,00	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1,00
5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			52.000.000,00	5.02.04.2.01.0015 - Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		50.200.000,00
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi /tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	4,00	52.000.000,00	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi /tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	50.200.000,00
Meningkatkan upaya elektrifikasi dan identifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	12,74	726.319.000,00	Meningkatkan upaya elektrifikasi dan identifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	12,74
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD (%)	9,70	1.454.249.079,00	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD (%)	9,70
Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Penelbihan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	100,00	726.319.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Penelbihan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	100,00
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.000,00			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.000,00
	Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan NOLP nya (Objek Pajak)	167.000,00			Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan NOLP nya (Objek Pajak)	167.000,00

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	175.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	175.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	75,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	75,00	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	170.000,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	170.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.000,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30,00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30,00	
						1.000.000,00
5.02.04.2.01.0005 - Produksi dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			5.500.000,00	5.02.04.2.01.0005 - Produksi dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
Terselenggaranya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.000,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5.000,00	1.000.000,00
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			225.000.000,00	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
Terselenggaranya Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	100,00	225.000.000,00	Terselenggaranya Pengolahan, Peneliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,00	79.529.100,00
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			45.900.000,00	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Terselenggaranya Jumlah Objek Pajak yang Dihasilkan NJOIP nya	Jumlah Objek Pajak yang Dihasilkan NJOIP nya (Objek Pajak)	167.000,00	45.900.000,00	Terselenggaranya Jumlah Objek Pajak yang Dihasilkan NJOIP nya (Objek Pajak)	167.000,00	45.000.000,00
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah			5.500.000,00	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah		
Terselenggaranya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	170.000,00	5.500.000,00	Terselenggaranya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	170.000,00	

5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		50.614.000,00	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			25.000.000,00
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30,00	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	30,00	25.000.000,00
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		200.000.000,00	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			155.600.570,00
Tersedianya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.000,00	Tersedianya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.000,00	155.600.570,00
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah		154.747.000,00	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah			75.000.000,00
Tersedianya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	175.000,00	Tersedianya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	175.000,00	75.000.000,00
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		39.058.000,00	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			35.000.000,00
Tersedianya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	75,00	Tersedianya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	75,00	35.000.000,00

2.5 Penelaah terhadap Usulan Masyarakat

Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk tahun 2027 BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Adapun terhadap telaah tersebut digambarkan dalam Tabel T.C.32

Tabel T.C-32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2027
pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<i>NIHIL</i>					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi, Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, serta Kewaspadaan Nasional;

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;

3. Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik;

4. Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Stabilitas Politik dan Demokrasi, Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, serta Kewaspadaan Nasional;

5. Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis di atas, ditetapkan 4 Program Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa

2. Program Tata Kelola Kependudukan
3. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum
4. Program Dukungan Manajemen

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung 4 strategis, pada program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan sasaran program **Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**". Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:
Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusi, dan stabil.
2. Sasaran Strategis 2:
Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang maksimal
3. Sasaran Strategis 3:
Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas
4. Sasaran Strategis 4:
Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, inovatif
5. Sasaran Strategis 5:
Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformative, efisiensi, dan berintegritas.
6. Sasaran Strategis 6:
Pencapaian tugas khusus yang efektif

Yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pada Sasaran

strategis I, Sasaran strategis 4 Sasaran strategis 5 yaitu **Opini BPK Atas Laporan Keuangan, Nilai AKIP Perangkat Daerah, Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Kemandirian Fiskal.**

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Visi bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicitakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029 Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2029 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025- 2029 adalah :

Visi : “PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Maju:** Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

- b) Tumbuh:** Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik.
- c) Berkelanjutan:** Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- “Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Misi

ini bertujuan untuk menciptakan aparaturnya pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

- “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Misi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.
- “Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”.

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan

nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

- “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif”. Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.
- “Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana”. Pesisir Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami,

banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu : **"Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas"**, namun, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala, antara lain :

1. Kemampuan teknis SDM Perangkat Daerah kurang memadai;
2. Peraturan tentang Pengelolaan keuangan selalu berubah dan saling bertentangan satu sama lain;
3. Nilai Jual Objek Pajak belum pernah disesuaikan sehingga potensi pajak daerah belum bisa dioptimalkan sebagai upaya untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Daerah;
4. Masih belum optimalnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah.
5. Belum ada kelembagaan dalam pengelolaan asset jadi belum ada perda BUMD nya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Mengacu didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu

ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan rencana strategis 5 (lima) tahun, untuk berkesinambungannya suatu perencanaan maka disusun renja Perangkat Daerah tahun 2027 yang bertujuan *"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel"*.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu "

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Stategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;

- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).
- f. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui penambahan sumber-sumber pendapatan baru seperti pengembangan sektor ekonomi baru yang potensial, pencarian sumber pendapatan alternatif, pengembangan usaha daerah dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain.

**Tabel 3.1. Tujuan Sasaran BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
pada Tahun 2027**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	-	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	90
		2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,93
	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	4. Indeks Kemandirian Fiskal	0,12

Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Kunci sesuai Renstra BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 pada Tahun 2027

NO	IKK	Target
1	Rasio PAD	9,70
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,00
3	Assets Manajement	100,00
4	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	12,00
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	80,00
6	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,10
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	72,00

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kedudukan memiliki Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dapat diuraikan sebagai berikut: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Perangkat Daerah melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1(satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Bidang. Sekretariat dibantu 1 (satu) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional, masing-masing bidang dibantu 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional. Berikut Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 Jabatan Fungsional :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional atau pelaksana;
3. Bidang Anggaran terdiri atas:
 - a. sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran; dan
 - c. sub bidang penyusunan anggaran.
4. Bidang perbendaharaan dan pengelola kas Daerah terdiri atas :
 - a. sub bidang perbendaharaan; dan
 - b. sub bidang pengelola kas Daerah.
5. Bidang akuntansi terdiri atas :
 - a. sub bidang pembukuan dan pelaporan; dan
 - b. sub bidang kebijakan dan bina keuangan.
6. Bidang pengelola barang milik Daerah terdiri atas:
 - a. sub bidang perencana, pengawasan dan pengendalian BMD;
 - b. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah.
7. Bidang perencana, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. sub bidang perencana pendapatan Daerah; dan
 - b. sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah.
8. Bidang pengelola pajak Daerah terdiri atas :
 - a. sub bidang pendataan dan penctapan pajak Daerah; dan

b. sub bidang penagihan pajak Daerah.

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis Pengelola Keuangan, pendapatan, dan BMD;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis Pengelola Keuangan, pendapatan, dan BMD;
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
4. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan BUD;
- d. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan barang milik daerah;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Dan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 6 (Enam) Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Bidang Perencana, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelola Pajak Daerah serta Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Bupati Daerah Nomor 32 Tahun 2024, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masingnya sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Badan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Badan Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala badan;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan badan;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan badan;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama pengurus barang;

- h. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, perencanaan dan penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas:

- a. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan pengelolaan anggaran Daerah;
- b. Pengelolaan pelaksanaan anggaran Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan anggaran Daerah;
- d. Perumusan norma, standar, prosedur kriteria dibidang penyusunan di bidang anggaran Daerah;
- e. Perumusan bahan penetapan produk hukum tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Anggaran, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran

Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan dan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan konsep dan usulan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis Badan;

- b. Penyiapan bahan produk hukum terkait kebijakan anggaran Daerah;
 - c. Evaluasi anggaran tahun yang lalu sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya;
 - d. Penyiapan penyusunan KUA-PPAS dan perubahan KUPA PPAS;
 - e. Pelaporan kegiatan sub bidang perencanaan dan kebijakan anggaran;
 - f. Sosialisasi produk hukum dan aturan terkait kebijakan penyusunan anggaran;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

Sub Bidang Penyusunan Anggaran membantu Kepala Bidang dalam menyusun kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan konsep dan usulan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang serta sumber daya yang ada berpedoman kepada renstra Badan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang penyusunan anggaran;
- c. Pengumpulan dan pengadministrasian rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan daftar pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- e. Fasilitasi tim anggaran pendapatan daerah dalam rangka pembahasan RKA satuan kerja perangkat daerah;

- f. Penyiapan bahan produk hukum terkait penyusunan APBD;
- g. Penghimpunan bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
- h. Pemeriksaan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan anggaran;
- i. Penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Pengelola kas daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di sub bidang perbendaharaan dan sub bidang pengelola kas daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perbendaharaan dan pengelola kas daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
- b. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
- c. Penyusunan peraturan bupati di bidang perbendaharaan dan pengelola kas daerah;
- d. Perumusan standar operasional prosedur terkait perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kas umum daerah;
- e. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah (bud) dalam hal penatausahaan keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan penyediaan sistem informasi keuangan daerah;
- h. Perumusan standar operasional prosedur perencanaan, pengendalian, dan pengawasan sistem informasi keuangan daerah; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah terdiri dari

1. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang
- b. Penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pengoordinasian anggaran kas satuan kerja perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah membayar untuk penerbitan surat perintah pencairan dana satuan kerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen untuk penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- f. Penyusunan bahan penerbitan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian bendahara satuan kerja perangkat daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan sub bidang pengelola kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pengelola kas daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan laporan kas harian rekening kas umum daerah;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi bank terhadap rekening kas umum daerah secara periodik;
- d. Pengelolaan dana transfer;
- e. Penyusunan bahan keputusan kepala Daerah terkait pembukaan dan penutupan rekening bank bendahara satuan kerja perangkat daerah;
- f. Penyusunan bahan manajemen kas umum daerah terkait penyertaan modal, deposito, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam menyelenggarakan urusan pada akuntansi, pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang akuntansi;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- c. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
- d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas;
- f. Penyusunan laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang akuntansi terdiri dari:

1. Sub bidang pembukuan dan pelaporan

Sub bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyelenggarakan urusan pada sub bidang pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pembukuan dan pelaporan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. Penyiapan bahan dan menyusun laporan realisasi apbd bulanan, triwulanan dan semesteran;
- e. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan badan layanan umum daerah;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sub bidang kebijakan dan bina keuangan

Sub bidang kebijakan dan bina keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyelenggarakan urusan pada sub bidang kebijakan dan bina

keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub bidang kebijakan dan bina keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang kebijakan dan bina keuangan serta
- b. Sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Perumusan dan penyusunan kebijakan akuntansi dan standar operasional prosedur bidang akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi penatausahaan keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

Bidang Pengelola BMD mempunyai tugas pokok melaksanakan dan membina perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian barang milik Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengelola BMD mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang barang milik daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengawasan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah dengan pengelola barang; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelola Barang Milik Daerah terdiri dari:

1. Sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah

Sub Bidang Perencanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah. Dalam menyelenggarakan fungsi, Sub Bidang Perencanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pengumpulan dan penyusunan bahan pertimbangan rencana kebutuhan pengadaan barang milik Daerah kepada pengelola barang;
- c. Pengumpulan dan penyusunan bahan pertimbangan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah kepada pengelola barang;
- d. Penyiapan penetapan kebijakan dalam perencanaan dan pengadaan barang milik Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian barang milik Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas sub bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik Daerah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan bahan penetapan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- c. Penyusunan bahan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah;
- d. Penyiapan penetapan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Perencana, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencana, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (PMEPD) mempunyai tugas urusan di bidang dengan melakukan perumusan konsep perencanaan, Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang PMEPD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi pendapatan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
- d. Perumusan prosedur standarisasi operasional pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- e. Perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- f. Perumusan sistem dan prosedur pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. Penyusunan produk hukum pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- h. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
- j. Penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencana, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencana Pendapatan Daerah

Sub Bidang Perencana Pendapatan Daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada sub bidang perencana pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Perencana Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang perencana pendapatan daerah;
- b. Pengumpulan bahan-bahan dan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi hasil pajak dan retribusi untuk nagari;
- d. Penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pendapatan asli daerah;

- e. Penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup pendapatan daerah;
 - f. Penyusunan konsep analisa dan rancangan pendapatan daerah;
 - g. Pelaksanaan penilaian (appraisal) pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Penyusunan konsep petunjuk teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
 - i. Penyusunan konsep evaluasi dan penerbitan produk hukum tentang pendapatan asli daerah;
 - j. Pelaksanaan pengembangan sistim informasi pendapatan daerah berbasis teknologi informasi;
 - k. Penyiapan bahan penghitungan penetapan alokasi bagi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk nagari;
 - l. Penyiapan usulan penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. Pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
 - n. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait pendapatan daerah; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan
2. Sub Bidang monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
- Sub Bidang monitoring dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pada sub bidang monitoring dan evaluasi pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bidang monitoring dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai uraian tugas:
- a. Penyusunan program, kegiatan dan rencana kerja terkait kebijakan dan pengendalian;

- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan dan penghimpunan pelaporan pendapatan daerah;
- d. Pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
- f. Pembuatan laporan pendapatan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pengelola Pajak Daerah

Bidang Pengelola Pajak Daerah mempunyai tugas membantu kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Pengelola Pajak Daerah dalam merumuskan, melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan, penilaian, pengolahan data pajak Daerah serta penagihan dan penyelenggaraan pelayanan pajak Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelola Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan pengelola pajak daerah;
- b. Penelitian dan verifikasi data wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
- c. Penetapan wajib pajak daerah dan objek pajak daerah;
- d. Penetapan pajak daerah;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
- f. Penagihan, pelayanan dan konsultasi pajak daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelola Pajak Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah

Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan urusan sub bidang pendataan dan

penetapan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang pendataan dan penetapan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan wajib pajak dan objek pajak daerah;
- c. Pengumpulan bahan-bahan dan perumusan dasar pengenaan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan verifikasi terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- e. Pengelolaan basis data pajak daerah;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan dan mengevaluasi terhadap pajak daerah;
- g. Pemberian pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

2. Sub Bidang penagihan pajak Daerah

Sub Bidang penagihan pajak Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan urusan sub bidang penagihan pajak Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Sub Bidang penagihan pajak Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. Penyusunan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran sub bidang penagihan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan perencanaan penagihan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan;
- d. Pelaksanaan pelaporan pajak daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Saat ini ada 2 (dua) Jabatan Fungsional yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yaitu:

1. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/ PMK.07/ 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah

2. Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk pengeendalian, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2027 sebanyak 4 program dan 14 Kegiatan dengan 71 Sub Kegiatan, rencana anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 284.676.601.585,-. Rencana pelaksanaan program kegiatan pada BPKPAD ini dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini dapat dirinci pada tabel T.C.33 terlampir sebagai berikut

Tabel T.C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028

Kabupaten Pesisir Selatan

No	REKAM URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Target Akhir Periode Rencana RPDP OPD	Realisasi Capaian Rencana OPD Tahun 2025	Perkiraan Capaian Target Rencana OPD Tahun 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Kategori Sasaran	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		Perkiraan Dampak Peningkatan jasa
						Target 2027	Pago Indikatorif	Tahun	Sumber Dana		PRIORITAS	TABURIT	
1	1.02 - KEBANGSAAN 1.02.01 - PROGRAM PENGUSAHAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA Mengembangkan (tan Kellala Organisasi)	Jumlah Inovasi (Dewasa) Penerapan Inovasi Bidang/Sektor yang diupayakan (%) Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)				344.676,00 / 202,00						344.676,00 / 181,00	
						31.360.301.009,00						31.360.301.009,00	HPKPAD
						31.360.301.009,00						31.360.301.009,00	HPKPAD
													HPKPAD
	2.02.01 - Peningkatan, Pengembangan, dan Penguatan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					57.680.000,00					57.680.000,00	HPKPAD
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wilayah Persebaran Statistik Sekunder Daerah (Dokumen)											HPKPAD
		Jumlah Dokumen TPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)											HPKPAD
		Jumlah Data Statistik Sekunder Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lengkap Peningkatan Daerah (Data)											HPKPAD
		Jumlah Kerja Sama Hasil Toran Peningkat Daerah Berdimensi Bidang Urusan yang Diupayakan Rangka Peningkatan Dokumen Peningkatan Peningkatan (Berita Acara)											HPKPAD
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)											HPKPAD
		Jumlah Dokumen Peningkatan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Dokumen Peningkatan DPA-SKPD (Dokumen)											HPKPAD
		Jumlah Dokumen Peningkatan Urusan Sektor Kewira PD dan Rangka PD yang diupayakan (Dokumen)											HPKPAD
		Jumlah Dokumen Peningkatan Peningkatan Daerah (Dokumen)											HPKPAD
		Jumlah Dokumen Peningkatan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Dokumen Peningkatan RKA-SKPD (Dokumen)											HPKPAD

Terselenggara Layanan dan Kontrolasi Pajak Daerah 5.02.04.2.01.0010 - Penilaian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Kontrolasi Pajak Daerah (Layanan)	25.000.000,00	25.000.000,00	BPKPAD
Terselenggara Penilaian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 5.02.04.2.01.0011 - Pengujian Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Tidak Dilakukan Penilaian dan Verifikasi (Dokumen)	138.000.000,00	138.000.000,00	BPKPAD
Terselenggara Pengujian Pajak Daerah 5.02.04.2.01.0012 - Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengujian Pajak Daerah (Dokumen)	155.000.000,00	155.000.000,00	BPKPAD
Terselenggara Penyelamatan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelamatan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	75.000.000,00	75.000.000,00	BPKPAD
		75.000.000,00	75.000.000,00	BPKPAD
		25.000.000,00	25.000.000,00	BPKPAD
		25.000.000,00	25.000.000,00	BPKPAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Tahun 2027 mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian target peningkatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam perencanaan awal 2027 pagu anggaran yang dikelola oleh BPKPAD sebesar Rp. 284.676.601.585,-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Pagu Indikatif
5.02 - KEUANGAN		284,676,601,585.00
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		31,360,501,109.00
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Jumlah Inovasi (Inovasi)	31,360,501,109.00
	Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		57,680,000.00
Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	57,680,000.00
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	

	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		57,680,000.00
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	57,680,000.00
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		28,609,682,658.00
Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	28,609,682,658.00
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		28,364,762,658.00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	28,364,762,658.00
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		244,920,000.00
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	244,920,000.00
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		15,000,000.00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15,000,000.00
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10,000,000.00
Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10,000,000.00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	

	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10,000,000.00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10,000,000.00
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		406,584,451.00
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	406,584,451.00
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		41,000,000.00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	41,000,000.00
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20,000,000.00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20,000,000.00
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		29,942,140.00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29,942,140.00

5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24,016,600.00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24,016,600.00
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		13,600,000.00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	13,600,000.00
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material		10,000,000.00
Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10,000,000.00
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		10,000,000.00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	10,000,000.00
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250,625,711.00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250,625,711.00
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		7,400,000.00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7,400,000.00
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		202,442,000.00
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	202,442,000.00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel		57,860,000.00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	57,860,000.00
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		144,582,000.00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	144,582,000.00
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,177,112,000.00
Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1,177,112,000.00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	

5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		513,200,000.00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	513,200,000.00
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		663,912,000.00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	663,912,000.00
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		882,000,000.00
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	882,000,000.00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		42,000,000.00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	42,000,000.00
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		195,000,000.00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	195,000,000.00
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		5,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5,000,000.00
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		90,000,000.00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	90,000,000.00
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		550,000,000.00

Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	550,000,000.00
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		251,331,164,773.00
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	1,468,769,317.00
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1,468,769,317.00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1,468,769,317.00
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		391,588,950.00

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	391,588,950.00
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		75,000,000.00
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	75,000,000.00
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100,249,950.00
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	100,249,950.00
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		104,101,200.00
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Dokumen)	104,101,200.00
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		63,144,300.00
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	63,144,300.00
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		30,600,000.00
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	30,600,000.00
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		76,500,000.00
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	76,500,000.00
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		11,100,000.00

Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	11,100,000.00
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota		38,898,900.00
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	38,898,900.00
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		51,242,300.00
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	51,242,300.00
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		51,909,475.00
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	51,909,475.00
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		33,610,850.00
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	33,610,850.00
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		31,045,450.00
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31,045,450.00
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		79,550,250.00
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	79,550,250.00
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		75,161,400.00
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	75,161,400.00
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		462,528,320.00
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	462,528,320.00
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		474,006,000.00
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	474,006,000.00
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		131,490,136.00

Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	131,490,136.00
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		78,225,136.00
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	78,225,136.00
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		357,445,791.00
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	357,445,791.00
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		51,950,000.00
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	51,950,000.00

5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		56,029,500.00
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	56,029,500.00
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		249,041,281,115.00
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	249,041,281,115.00
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	
	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		241,096,857,600.00
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	241,096,857,600.00
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		5,000,000,000.00
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5,000,000,000.00
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota		2,944,423,515.00
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota (Laporan)	2,944,423,515.00
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		72,079,600.00

Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	72,079,600.00
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		249,466,291.00
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	11,100,000.00
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		998,723,583.00
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	998,723,583.00
	Assets Management (%)	
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga		42,509,650.00
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	42,509,650.00
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		23,071,050.00
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	23,071,050.00
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		36,179,750.00
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	36,179,750.00
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah		385,136,000.00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	385,136,000.00
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah		53,271,635.00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	53,271,635.00
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		25,000,000.00
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	25,000,000.00
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		320,606,000.00
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	320,606,000.00

5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		20,237,342.00
Tertindakannya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	20,237,342.00
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		49,013,710.00
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	49,013,710.00
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		43,698,446.00
Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	43,698,446.00
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		986,212,120.00
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	986,212,120.00
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		986,212,120.00
Tertindakannya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	986,212,120.00
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		9,565,000.00
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	9,565,000.00
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		71,510,200.00
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Tertindakannya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	71,510,200.00
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		83,406,600.00
Tertindakannya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	83,406,600.00
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		70,000,000.00
Tertindakannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	70,000,000.00

5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		173,134,800.00
Tertindakannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	173,134,800.00
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		112,265,650.00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	112,265,650.00
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		50,200,000.00
Tertindakannya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	50,200,000.00
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		1,000,000.00
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1,000,000.00
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		79,529,300.00
Tertindakannya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	79,529,300.00
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		45,000,000.00
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	45,000,000.00
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		25,000,000.00
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	25,000,000.00
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		155,600,570.00
Tertindakannya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	155,600,570.00
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah		75,000,000.00
Tertindakannya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	75,000,000.00
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		35,000,000.00
Tertindakannya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	35,000,000.00

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja- SKPD BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiaayaannya berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2027.

Selanjutnya Renja Tahun 2027 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan,
SUHANDRI, SE., M.Si
NIP. 19700608 200212 1 003